



Keterlibatan Warga Negara (*Civic Engagement*) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan

Setiawan Gusmadi*

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Diterima Pebruari 2018; Disetujui April 2018; Dipublikasikan Juni 2018

Abstrak

Pembahasan artikel ini bertujuan untuk menggali secara mendalam tentang keterlibatan warga negara dalam memperkuat karakter peduli lingkungan. Keterlibatan warga negara mengacu pada cara warga berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat untuk memperbaiki kondisi orang lain atau untuk membantu membentuk masa depan masyarakat. Penulisan artikel ini didukung oleh studi kepustakaan dan jurnal penelitian yang relevan dalam bentuk jurnal nasional dan jurnal internasional. Gerakan untuk memperbaiki lingkungan masyarakat yang lebih efektif haruslah didukung dalam hal pendidikan yang mengembangkan masyarakat bertanggung jawab, kreatif dan berpengetahuan luas. Keterlibatan warga negara menjadi penting untuk berkontribusi dalam sebuah komunitas yang bergerak untuk mengelola dan melestarikan lingkungan seperti strategi pengembangan Yayasan Mangrove Center. Kegiatan relawan atau aktifis masyarakat terkait kepedulian lingkungan diharapkan terciptanya rasa peduli lingkungan, memiliki sikap kritis, bisa menjadi inspirasi untuk membangun gerakan-gerakan kepedulian lingkungan melalui sikap dan perbuatan. Keterlibatan warga negara ini diharapkan bisa memperkuat karakter lingkungan peduli dengan mengidentifikasi dan membandingkan suatu kegiatan guna memperbaiki, mengurangi limbah dan kerusakan pada lingkungan hidup.

Kata Kunci: Keterlibatan Kewarganegaraan, Karakter, Peduli Lingkungan.

Abstract

The discussion of this article aims to explore deeply about the involvement of citizens in strengthening the environmental caring character. Civic Engagement refers to the way citizens participate in people's lives to improve the condition of others or to help shape the future of society. The writing of this article is supported by literature studies and relevant research journals in the form of national journals and international journals. Movements to improve the environment of a more effective society should be supported in education that develops a responsible, creative and knowledgeable society. Citizen engagement becomes important to contribute to a moving community to manage and preserve the environment such as the Mangrove Foundation's development strategy. Volunteer activities or community activists related to environmental concerns are expected to create a sense of environmental care, have a critical attitude, can be an inspiration to build environmental awareness movements through attitudes and deeds. The involvement of citizens is expected to strengthen the environmental character of care by identifying and comparing activities to improve, reduce waste and damage to the environment.

Keywords: *Citizenship Involvement, Character, Environmental Care.*

How to Cite: Gusmadi, S. (2018). Keterlibatan Warga Negara (*Civic Engagement*) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1): 31-37.

*Corresponding author:
E-mail: gusmadi.setiawan@gmail.com

PENDAHULUAN

Beradaptasi dengan perubahan global akan memerlukan berbagai kemampuan baru dalam memperbaiki kualitas hidup manusia. Memperbarui institusi pendidikan akan mengidentifikasi dan merespons perubahan lingkungan secara lebih baik. Keterlibatan warga negara dalam *community civic* sebagai pemecahan masalah lingkungan melalui pelatihan yang dilakukan aktivis lingkungan. *Civic Engagement* merupakan salah satu konsep utama dalam *community civic* yang menekankan pada keterlibatan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan (Syaifullah, 2015).

Lingkungan kewarganegaraan tidak akan muncul secara spontan, mereka harus diciptakan secara kolektif. Setiap warga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat (Asshiddiqie, 2009: 39). Masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan juga merupakan persoalan dalam ruang lingkup nasional. Hal ini disebabkan karena menyangkut keberhasilan pembangunan nasional, khususnya keberhasilan dalam jangka panjang, agar kesejahteraan yang lebih baik dapat juga dinikmati oleh generasi mendatang.

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam pengolahan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 70 ayat 1 adalah masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penggunaan sumber daya secara optimal dapat mengurangi kerusakan alam. Pengembangan teknologi sangat memerhatikan kepentingan menyeluruh antara manusia dengan keselamatan alam dan lingkungan.

Pendidikan lingkungan tidak hanya digunakan dalam arti sempit pengajaran atau pembelajaran di sekolah formal atau universitas (Hilson, 2017). Perubahan perilaku pro-lingkungan: yang dianggap sebagai tujuan jelas dari pendidikan lingkungan. Hasil penelitian Syahri (2013) memandang bahwa kegiatan partisipasi warga negara dalam pelatihan bagi masyarakat dapat digerakkan dengan penguatan organisasi-organisasi relawan pecinta lingkungan hidup. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk lingkungan yang bersih, menjaga lingkungan hidup dengan

fasilitas yang modern. Partisipasi tersebut dengan pembekalan dimensi pengetahuan, keterampilan dan nilai karakter peduli lingkungan sehingga tercapainya kepekaan melindungan lingkungan hidup. Pengertian yang lebih luas dalam mendidik masyarakat dan terutama kaum muda dengan melalui media, keluarga, tempat ibadah tentang pentingnya lingkungan.

Penting rasanya untuk mengambil langkah yang dimaknai sebagai nilai-nilai tingkah laku atau tindakan manusia berkenaan dengan Tuhan, diri sendiri, dan lingkungan. Proses belajar sosial yang panjang dilakukan oleh masyarakat mempunyai sistem yang dibangun sesuai dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial yang baik. Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan pendidikan karakter peduli lingkungan sangat diperlukan dalam pendidikan nonformal. pendidikan karakter melalui organisasi yang ada di masyarakat ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

Pemecahan masalah tersebut menjadi tanggung jawab semua kalangan masyarakat yang berkelompok dan individu sedangkan pemerintah sebagai perantara untuk pelestarian lingkungan hidup. Kualitas kesadaran manusia tidak terpisahkan dari lingkungan yang mempunyai tingkat kualitas keseimbangan lingkungan hidup.

Lingkungan kewarganegaraan melibatkan pemberdayaan orang untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengidentifikasi nilai dan tujuan mereka sehubungan dengan lingkungan dan bertindak sesuai, berdasarkan pengetahuan terbaik tentang pilihan dan konsekuensi (Berkowitz, Ford, & Brewer, 2005). Keterlibatan warga negara dalam kegiatan komunitas pecinta lingkungan secara kritis harus memahami masalah yang dihadapi masyarakat. Kelestarian alam menjadi tanggung jawab bersama dalam perubahan. Dengan organisasi komunitas peduli lingkungan diharapkan mampu menguatkan pemahaman masyarakat perilaku karakter peduli lingkungan yang bertanggung jawab. Tulisan ini berfokus pada beberapa permasalahan yang meliputi 1) karakter

peduli lingkungan; 2) keterlibatan warga negara dalam ekologi kewarganegaraan (*ecological Citizenship*).

PEMBAHASAN

Karakter Peduli Lingkungan

Melalui pendidikan menjadi salah satu menumbuhkan kesadaran warga negara akan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Pengetahuan timbul dalam lingkungan sehat positif dan negatif akan berdampak pada tindakan yang dilakukan warga negara. Pembentukan karakter dan moralitas warga negara tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan seseorang. Karakter dapat ditafsirkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan tindakan atau pola berfikir masyarakat. Manusia berkarakter memiliki kepedulian terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Peduli lingkungan menjadi penting dalam tumbuh kembangnya manusia (Naim, 2012). Peduli tidak hanya kepada orang lain saja tapi juga peduli akan lingkungan sekitar. Samani dkk, menegaskan bahwa:

Karakter peduli digambarkan bahwa peduli adalah memperlakukan orang lain dengan sopan, bertindak santun, toleran terhadap perbedaan, tidak suka menyakiti orang lain, mau mendengar orang lain, mau berbagi, tidak merendahkan orang lain, tidak mengambil keuntungan dari orang lain, mampu bekerja sama, mau terlibat dalam kegiatan masyarakat, menyayangi manusia dan makhluk lain, setia, cinta damai dalam menghadapi persoalan (Samani, 2012).

Adapun nilai-nilai dalam pendidikan karakter yang menerapkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Perpres No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter meliputi nilai (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa ingin tahu, (10) Semangat kebangsaan, (11) Cinta tanah air, (12) Menghargai prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta damai, (15) Gemar membaca, (16) Peduli lingkungan, (17) Peduli sosial dan (18) Tanggung jawab. Nilai karakter peduli lingkungan berupa sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, selain itu mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Peduli lingkungan dalam pendidikan kewarganegaraan terletak pada aspek karakter, yakni karakter peduli lingkungan yang mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi (Gunawati, 151). Kegiatan menumbuhkan karakter tersebut kita dapat mengadopsi konsep karakter baik dari yang dimulai dari mengenalkannya tentang kebaikan serta kewajiban warga negara terhadap lingkungannya (*moral knowing*), kemudian memberikan contoh-contoh perilaku, atau dampak-dampak mengenai masalah negara dengan lingkungan agar masyarakat menginginkan kebaikan dari menjaga lingkungan (*moral feeling*), dan memberikan kesempatan untuk dapat melakukan suatu tindakan menjaga lingkungan (*moral action*) sebagai bentuk kewajiban warga negara dengan lingkungan disekitarnya Lickona, 1991).

Keterlibatan warga negara dalam (*ecological Citizenship*).

Keterlibatan warga negara dalam kehidupan sosial menjadi harapan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat. *Civic Engagement* salah satu konsep utama dalam *Community Civics* untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan publik. Jacoby & Associates mengemukakan Jacoby & Associates, (2009) menyatakan bahwa *civic engagement encompasses actions wherein individuals participate in activities of personal and public concern that are both individually life enriching and socially beneficial to the community*. Pendapat tersebut menjelaskan keterlibatan warga negara mencakup tindakan dimana individu berpartisipasi dalam kegiatan kepedulian pribadi dan publik yang secara individual saling memperkaya dan bermanfaat secara sosial bagi masyarakat.

Keterlibatan warga negara telah didefinisikan sebagai proses mempercayai bahwa seseorang dapat dan harus membuat perbedaan dalam meningkatkan komunitasnya. Untuk meningkatkan masyarakat, seseorang

membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang dibutuhkan untuk membuat perbedaan. Kepemilikan dan demon-strasi pengetahuan, keterampilan, dan nilai tersebut diungkapkan melalui sikap dan perilaku (Doolittle & Faul, 2013).

Berjuang menuju kebaikan bersama melalui penanaman kebajikan akan menyebabkan tingginya integritas pendidikan di sekolah, pendidikan dalam keluarga dan pendidikan dalam masyarakat. Keterlibatan warga negara menekankan partisipasi dalam pelayanan sukarela kepada masyarakat setempat, baik oleh individu yang bertindak secara independen atau sebagai peserta dalam sebuah kelompok.

Keterlibatan warga negara menekankan partisipasi dalam pelayanan sukarela kepada masyarakat setempat, baik oleh individu yang bertindak secara independen atau sebagai peserta dalam sebuah kelompok.

Keterlibatan warga negara dapat didefinisikan sebagai cara dimana individu, melalui tindakan kolektif, mempengaruhi masyarakat sipil yang lebih besar (Adler & Goggin, 2005). Kewarganegaraan ekologis menyajikan sebuah catatan normatif tentang bagaimana warga negara harus menjalankan kehidupan mereka, mengurangi dampak lingkungan mereka. Tindakan yang dilakukan masyarakat menunjukkan perubahan perilaku dengan hasil negosiasi yang kompleks antara standar hidup, pengetahuan tentang penyebab dan kontribusi terhadap perubahan iklim (Wolf, Brown & Conway, 2009). Praktek kewarganegaraan ekologis melibatkan tindakan individu sebagai pemilih, konsumen, menyangkut implikasi kekuatan dan keadilan dari gaya hidup barat daya yang intensif.

Setiap warga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Berkowitz, Ford, & Brewer, (2005) menegaskan *environmental citizenship involves empowering people to have the knowledge, skills, and attitudes needed to identify their values and goals with respect to the environment and to act accordingly, based on the best knowledge of choices and consequences*. Pendapat tersebut menjelaskan kewarganegaraan lingkungan melibatkan pemberdayaan orang untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengidentifikasi nilai dan tujuan mereka sehubungan dengan lingkungan dan

bertindak sesuai berdasarkan pengetahuan terbaik tentang pilihan dan konsekuensi.

Setiap kasus tentunya ada kelemahan tentang perubahan perilaku masyarakat yang cepat, sementara lingkungan kewarganegaraan inisiatif bisa memakan waktu lebih lama (Dobson, 2007). Kendala yang tampaknya masalah berarti pada gerakan bersih lingkungan, menanan kembali pohon yang diterapkan pada peraturan perundang-undangan.

Kewarganegaraan ekologi telah disarankan sebagai pendorong perilaku pro-lingkungan individu, memberikan fondasi yang lebih stabil untuk perubahan gaya hidup daripada mengandalkan alat kebijakan eksternal (Jagers, Martinsson & Matti, 2013). Relevansi Ekologi kewarganegaraa untuk menjelaskan program pro-lingkungan diuji yang dirancang untuk menangkap berbagai aspek. Ekologi warga terikat pada wilayah negara dan dipraktekkan dalam pendidikan lingkungan secara eksklusif di masyarakat.

Kewarganegaraan ekologis melibatkan beberapa batasan hak dan tanggung jawab moral manusia dan alam. Secara eksplisit menggambarkan bagaimana kesadaran akan konsekuensi lingkungan mengarah pada kepercayaan normatif pribadi yang mengharuskan orang untuk kemudian terlibat dalam perilaku pro-lingkungan. Wawasan pendidikan lingkungan sangat penting untuk diimplikasikan dalam rangka memperluas pembelajaran *citizenship* dari lokal menuju global. Salah satu tantangan *environmental* kurang dihargai yang sekarang kita hadapi adalah kombinasi ketidakpedulian dan apatis antara warga dalam menghadapi iklim global perubahan dan penurunan keanekaragaman hayati. Memperluas konsep kewarganegaraan menjadi kebutuhan pengalaman belajar warga dilakukan secara komprehensif evaluasi yang akan memberikan wawasan yang berguna bagi pendidik lingkungan hidup dan masa depan (Kelly, Rebecca & Abel, 2012).

Dapat dipahami bahwa individu yang berpikir sepanjang garis ekologi kewarganegaraan untuk berperilaku ramah lingkungan dalam aktivitas warga negara. Aspek ekologi kewarganegaraan tertentu lebih penting bagi perilaku pro-lingkungan daripada yang lain. Kewarganegaraan ekologis telah disarankan sebagai pendorong perilaku pro-lingkungan

individu, memberikan fondasi yang lebih stabil untuk perubahan gaya hidup daripada mengandalkan alat kebijakan eksternal.

Skala *New Ecological Paradigm* (NEP) digunakan untuk mengukur sikap dan kesiapan berperilaku peduli lingkungan. Skala paradigma ekologis baru mencakup pandangan yang lebih lengkap dan terperinci dalam mengukur sikap kepedulian lingkungan. NEP hasil revisi memaksimalkan nilai validitas konten yang dimiliki dan terbukti konsisten sebagai alat ukur. Skala paradigma ekologis baru mengidentifikasi 5 dimensi ekologi meliputi dimensi *balance of nature*, *limit to growth*, *anti anthropocentrism*, *anti-exemptionalism* dan *eco-crisis* (Dunlap, 2000: 425-442). Lima dimensi ekologi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Paradigma Ekologis Baru (NEP)	
1	<i>Balance of nature</i> (Keseimbangan alam)	Bila manusia mengganggu alam, seringkali menimbulkan konsekuensi bencana. Keseimbangan alam cukup kuat untuk mengatasi dampak negara industri modern. Keseimbangan alam sangat halus dan mudah kesal.
2	<i>Eco-crisis</i> (Ekokrisis)	Manusia sangat menyalahgunakan lingkungan. Apa yang disebut "krisis ekologis" yang dihadapi umat manusia telah dibesar-besarkan. Jika semuanya berlanjut pada kursus mereka sekarang, kita akan segera mengalami bencana ekologis yang besar.
3	<i>Anti-exemptionalism</i> (Anti-ekspecialisasi)	Kecerdikan manusia akan memastikan bahwa kita tidak membuat bumi tidak dapat dipercaya. Terlepas dari kemampuan kita, manusia masih tunduk pada hukum alam. Manusia pada akhirnya akan cukup belajar tentang bagaimana alam bekerja untuk bisa mengendalikannya.
4	<i>Limits to growth</i> (Batas pertumbuhan)	Kita mendekati batas jumlah orang yang bisa didukung bumi. Bumi seperti pesawat ruang angkasa dengan ruang dan sumber yang sangat terbatas. Bumi memiliki banyak sumber daya alam jika kita hanya belajar mengembangkannya.
5	<i>Anti-anthropocentrism</i> (dominasi manusia)	Manusia memiliki hak untuk memodifikasi lingkungan alam agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Tanaman dan hewan memiliki hak sebanyak manusia untuk eksis. Manusia dimaksudkan untuk menguasai seluruh alam.

Tabel 1. Item Sarana dan Standar Deviasi untuk Skala Paradigma Ekologis Baru

Kelima dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dimensi *balance of nature* mengukur keyakinan bahwa keseimbangan alam sangat rentan. Alam rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia. Dimensi *limit to growth* mengukur keyakinan bahwa sumber daya yang ada di bumi memiliki keterbatasan. Dimensi *anti-anthropocentrism* mengukur keyakinan bahwa manusia memiliki hak untuk mengubah dan menguasai lingkungan alam. Dimensi *anti-exemptionalism* mengukur keyakinan bahwa kehidupan manusia tidak terbebas dari aturan alam/hukum alam. Dimensi *eco-crisis* mengukur keyakinan bahwa manusia menyebabkan kerusakan yang merugikan bagi lingkungan fisik, contohnya perubahan iklim. Dimensi *eco-crisis* melihat pandangan individu mengenai krisis ekologi dan kerusakan alam yang terjadi akibat aktivitas manusia.

Lingkungan kewarganegaraan mengakui hak-hak lingkungan dengan keterampilan yang dibatasi wilayah politik. Kewarganegaraan sebagai tujuan utama pendidikan lingkungan. Lima komponen tumpang tindih dari kewarganegaraan lingkungan meliputi sebagai berikut. 1) *Ecological Literacy*: memahami sistem ekologis utama dengan menggunakan pemikiran ekologis yang baik, sekaligus memahami sifat ilmu ekologi dan hubungannya dengan masyarakat. 2) *Civics Literacy*: memahami sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politik kunci dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan. 3) *Values Awareness*: kesadaran akan nilai-nilai pribadi berkenaan dengan lingkungan, dan kemampuan untuk menghubungkan nilai-nilai ini dengan pengetahuan dan kebijaksanaan praktis untuk membuat keputusan dan tindakan. 4) *Self-efficacy*: memiliki kemampuan untuk belajar dan bertindak berkenaan dengan nilai dan kepentingan pribadi di lingkungan. 5) *Practical Wisdom*: memiliki kebijaksanaan praktis dan keterampilan untuk pengambilan keputusan dan bertindak berkenaan dengan lingkungan (Berkowitz, Ford, & Brewer, 2005).

Salah satu penelitian berbasis masyarakat tentang strategi pengembangan *ecological citizenship* Yayasan *Mangrove Center* Tuban. Keterlibatan warga negara dapat diwujudkan dengan kesadaran bersama dalam sekolah peduli lingkungan. Hasil penelitian tersebut meliputi 1)

strategi pelaksanaan program kerja kepada para anggota dan masyarakat yang meliputi program konservasi dan pembibitan, program pemberdayaan *ecogreen* dan program pembinaan sekolah peduli lingkungan; 2) terjalinnya hubungan baik antara manusia dan alam melalui kegiatan konservasi, masyarakat memiliki kepedulian serta kesadaran terhadap hak dan kewajibannya dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan kegiatan penanaman pohon, bersih-bersih pantai, perawatan terhadap tanaman, perawatan terhadap mata air, tidak mengambil pasir pantai untuk kepentingan pribadi serta selalu menjaga kebersihan lingkungan (Nurmayanti & Harmanto, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui keberhasilan memberdayakan masyarakat dalam memperbaiki kerusakan lingkungan. Kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat dalam program *mangrove center*. Berlangsungnya pendidikan dalam masyarakat dilakukan oleh organisasi komunitas pecinta lingkungan yang memberi kontribusi memberdayakan masyarakat berkelanjutan. Gerakan memperbaiki lingkungan hidup masyarakat yang lebih efektif haruslah didukung dari segi pendidikan yang mengembangkan masyarakat bertanggung jawab, kreatif dan berilmu. Pendekatan pendidikan kemasyarakatan adalah salah satu pendekatan yang melihat masyarakat sebagai agen dan objek sekaligus. Dalam proses ini, para pemimpin masyarakat perlu menempatkan diri sebagai fasilitator yang mendorong perubahan menuju ke arah yang lebih baik

SIMPULAN

Keterlibatan warga negara diharapkan mampu menguatkan karakter peduli lingkungan. Pemberdayaan masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dengan tujuan bertindak sesuai berdasarkan pengetahuan terbaik tentang pilihan dan konsekuensi. Gerakan memperbaiki lingkungan hidup masyarakat yang lebih efektif haruslah didukung dari segi pendidikan yang mengembangkan masyarakat bertanggung jawab, kreatif dan berilmu. Keterlibatan warga negara menjadi penting untuk berkontribusi dalam

komunitas yang bergerak mengelola, menjaga dan melestarikan lingkungan seperti strategi pengembangan Yayasan *Mangrove Center*. Keterlibatan warga negara dalam kegiatan relawan atau aktifis lingkungan terkait kepedulian lingkungan di kalangan masyarakat diharapkan terciptanya rasa peduli lingkungan, memiliki sikap kritis, bisa menjadi inspirasi untuk membangun gerakan-gerakan kepedulian lingkungan melalui sikap dan perbuatan. Keterlibatan warga negara adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan suatu kegiatan guna memperbaiki, mengurangi limbah dan kerusakan pada lingkungan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih saya ucapkan untuk teman-teman dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2016 yang telah memberikan koreksi dan saran terhadap artikel ini sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, R.P. & Goggin, J. (2005). What Do We Mean By "Civic Engagement"?. *Journal of Transformative Education*. 3, (3): 236-253.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Berkowitz, A.R. Ford, M.E. & Brewer, C.A. (2005). *A Framework for Integrating Ecological Literacy, Civics Literacy and Environmental Citizenship in Environmental Education*. Dalam E.A. Johnson dan M.J. Mappin (Eds.), *Environmental Education and Advocacy: Perspectives of Ecology and Education* (hal. 227-266). Cambridge: Cambridge University Press.
- Damanik, F.H.S. (2014). Hakikat Pancasila dalam Membentuk Karakter Kebangsaan melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6 (2): 49-60.
- Damanik, M Ridha S dan Deny S. (2016), Pengembangan Penilaian Autentik Berbasis Karakter pada Ranah Keterampilan di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8 (2) (2016): 88-94
- Dobson, A. (2007). Environmental citizenship: Towards sustainable Development, *Jurnal Sustainable Development*. 15, 276-285.
- Doolittle, A. & Anna, C.F. (2013). Civic Engagement Scale: A Validation Study", *Jurnal SAGE Open*. 1-7.

- Dunlap, R.E. et.al. (2000). Measuring endorsement of the new ecological paradigm: A revised NEP scale. *Journal of Social Issues*. 56, (3): 425-442.
- Gunawati, D. (2012). Meranap Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Konfigurasi Pendidikan Kewarganegaraan", *Jurnal PKn progresif*. 7, (2): 140-151.
- Hilson, C. (2017). Republican ecological citizenship in the 2015 papal Encyclical on the environment and climate change", *Jurnal Critical review of international social and political philosophy*. 1-13.
- Jacoby, B. & Associates. (2009). *Civic Engagement in Higer Education: Concepts and Practices*. United States: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
- Jagers, S.C. Martinsson, J. & Matti, S. (2013). Ecological citizenship: a driver of pro-environmental behaviour?", *Jurnal Environmental Politics*. 23 (3): 434-453.
- Kelly, J.R. & Abel, T.D. (2012). Fostering Ecological Citizenship: The Case of Environmental Service-Learning in Costa Rica", *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*. 6 (2): Article 16.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character*. New York: Bantam Books.
- Naim, N. (2012). *Charakter Buiding Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*. Jakarta: ArRuss Media.
- Nurmayanti, I. & Harmanto. (2017). Strategi yayasan mangrove center tuban dalam mengembangkan *ecological citizenship* pada masyarakat tuban. *Jurnal kajian moral dan kewarganegaraan*. 5, (2): 83-97.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Samani, M., dkk. (2012). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, D. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6 (2): 61-72.
- Syahri, M. (2013). Bentuk-bentuk partisipasi warga negara dalam pelestarian lingkungan hidup berdasarkan konsep green moral di Kabupaten Blitar. 119-134.
- Syaifullah. (2015). *Pemberdayaan Generasi Muda Sebagai Dasar Filosofis Dari Keterlibatan Warganegara (Civic Engagement): Tinjauan Tentang Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)*, dalam "Penguatan Komitmen Komunitas Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn", (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wolf, J. Brown, K. & Conway, D. (2009). Ecological citizenship and climate change: perceptions and practice", *Jurnal Environmental Politics*, 18 (4): 503-521.